

**KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DESA
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA DAN *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*
(Studi Kasus Desa Sidokerto Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)**

SKRIPSI

Oleh

M. Irfan Ma'ruf

NIM. 05010422012



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Irfan Ma'ruf
NIM : 05010422012
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa
Perspektif Peraturan Perundang – Undangan dan
Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus: Desa Sidokerto
Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 30 Maret 2026



M. Irfan Ma'ruf
NIM. 05010422012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : M. Irfan Ma'ruf


NIM : 05010422012

Judul : Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa Perspektif Peraturan Perundang – Undangan dan *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus: Desa Sidokerto Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 30 Maret 2026

Pembimbing,



Achmad Safiyudin R., M.H.
NIP. 199212292019031005

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : M. Irfan Ma'ruf

NIM. : 05010422012

Judul : Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa Perspektif Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus: Desa Sidokerto Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, tanggal 22 April 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Achmad Safiudin R., M.H.

NIP. 199212292019031005

Penguji III

Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.

NIP. 198611092019031008

Penguji II

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH., M.H.

NIP. 1968032920000032001

Penguji IV

Zainatul Ilmiyah, M.H.

NIP. 199302152020122020

Surabaya, 22 April 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel



Dr. Abdurrahman M. Asyraf, M.Ag.

NIP. 196109032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Irfan Ma'ruf
NIM : 05010422012
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Jurusan Hukum Publik/Prodi Hukum Tata Negara
E-mail address : imakruf203@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Desa Sidokerto Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Mei 2026

Penulis

M. Irfan Ma'ruf

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa Perspektif Peraturan Perundang-Undangan dan *Siyāsah Dustūriyah* (Studi Kasus: Desa Sidokerto Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)”. Judul ini diangkat atas dasar pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa di Desa Sidokerto yang tidak optimal. Hal tersebut mengakibatkan kedudukannya sebagai wakil rakyat tidak berjalan dengan semestinya. Skripsi ini menjawab dua rumusan masalah yakni bagaimana kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan aset desa di Desa Sidokerto Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo menurut perspektif Peraturan Perundang-Undangan dan akan ditinjau menggunakan *siyāsah dustūriyah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan *sociological jurisprudence*, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data induktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga mendapatkan data mengenai kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan aset desa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, yang kemudian akan dikaitkan dengan konsep Hukum Islam yakni *siyāsah dustūriyah masalahah*.

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pengelolaan aset desa oleh Kepala Desa Sidokerto tidak berjalan dengan optimal, hal tersebut dibuktikan dengan tata cara dalam hal pengamanan dan pemindahtanganan aset desa tanpa prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor lain yaitu kurang terlibatnya BPD dalam tahapan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan dari Kepala Desa yang cukup luas dikarenakan kurangnya pengawasan dan monitoring mengakibatkan penyalahgunaan oleh Kepala Desa. Kepala Desa telah menjual aset desa secara tertutup tanpa melalui mekanisme musyawarah desa dan transparansi terhadap masyarakat. Dalam tinjauan *siyāsah dustūriyah*, kekuasaan yang merupakan amanah harus dijalankan sesuai nilai keadilan, kemashlahatan, transparansi, serta musyawarah. Hal itu berkaitan dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan islam yaitu *Ahl al-hall wa al ‘aqdi*

Berdasarkan penelitian bahwa kewenangan pengelolaan aset Kepala Desa Sidokerto, maka penulis memberikan saran: *pertama*, penyelenggara pemerintahan desa yakni BPD dan Kepala Desa ataupun Perangkat Desa perlu menghadirkan harmonisasi, untuk menciptakan sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan aset desa. Selain itu *Kedua*, penguatan kapasitas dan pemahaman regulasi pengelolaan aset desa juga menjadi hal penting agar fungsi check and balance dalam pemerintahan desa dapat berjalan secara efektif demi kesejahteraan rakyat.

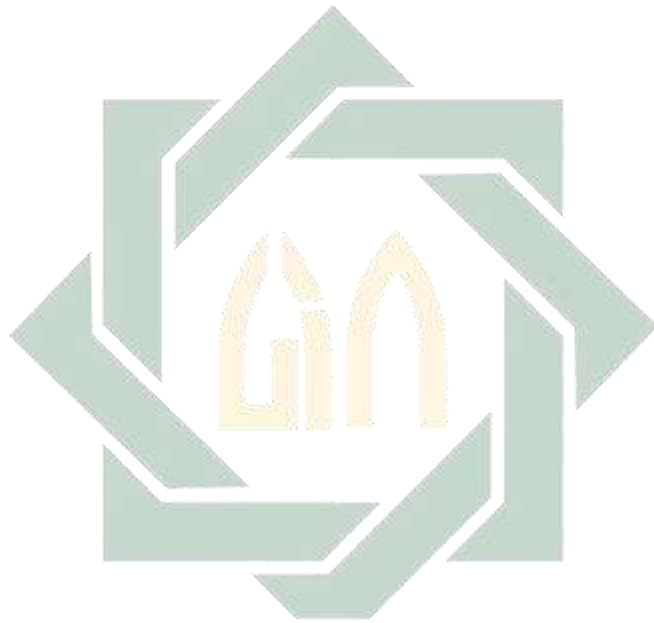
DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	viv
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Kajian Terdahulu	12
G. Landasan Teori	15
H. Definisi Operasional	18
I. Metode Penelitian	22
J. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II KERANGKA TEORITIS KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DESA DAN <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i> ..	28
A. Fiqh <i>Siyāsah dustūriyah</i>	28
1. Pengertian <i>siyāsah dustūriyah</i>	28
2. Ruang Lingkup dan Objek Kajian <i>Siyāsah Dustūriyah</i>	30
3. <i>Ahl al- ḥall wal ‘aqdi</i>	33
B. Teori Good Governance.....	35
1. Pengertian <i>Good Governance</i>	35
2. Prinsip <i>Good Governance</i> dalam pengelolaan aset desa.....	39
C. Teori Kewenangan	41

1.	Pengertian Kewenangan.....	41
2.	Kewenangan Kepala Desa dalam mengelola aset desa.....	44
BAB III IMPLEMENTASI KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DESA DI DESA SIDOKERTO		46
A.	Profil Umum Desa Sidokerto.....	46
1.	Letak Geografis.....	46
2.	Jumlah Penduduk	47
3.	Pemerintah Desa Sidokerto	48
B.	Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam pengelolaan Aset Desa di Desa Sidokerto.....	54
1.	Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Sidokerto	54
2.	Proses Pemindahtanganan Aset Desa.....	56
3.	Pengawasan Terhadap Kewenangan Kepala Desa dalam mengelola aset desa.....	59
4.	Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Desa.....	60
C.	Faktor Penghambat Pengelolaan Aset Desa di Desa Sidokerto.....	62
1.	Kurangnya ketelitian dan memperhatikan kepemilikan aset yang ada .	62
2.	Pengawasan yang kurang efektif.....	63
3.	Kurangnya transparansi dan partisipasif masyarakat dalam pengelolaan aset desa	63
BAB IV ANALISIS SIYĀSAH DUSTŪRIYAH TERHADAP KEWENANGAN KEPALA DESA SIDOKERTO DALAM PENGELOLAAN ASET DESA DI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.....		65
A.	Analisis Kewenangan Kepala Desa dalam mengelola aset desa di Desa Sidokerto Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	65
B.	Analisis Tinjauan Siyāsah Dustūriyah Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa Di Desa Sidokerto.....	75
BAB V PENUTUP.....		83
A.	Kesimpulan	83
B.	Saran	84
DAFTAR PUSTAKA		86
LAMPIRAN.....		92

DAFTAR GAMBAR

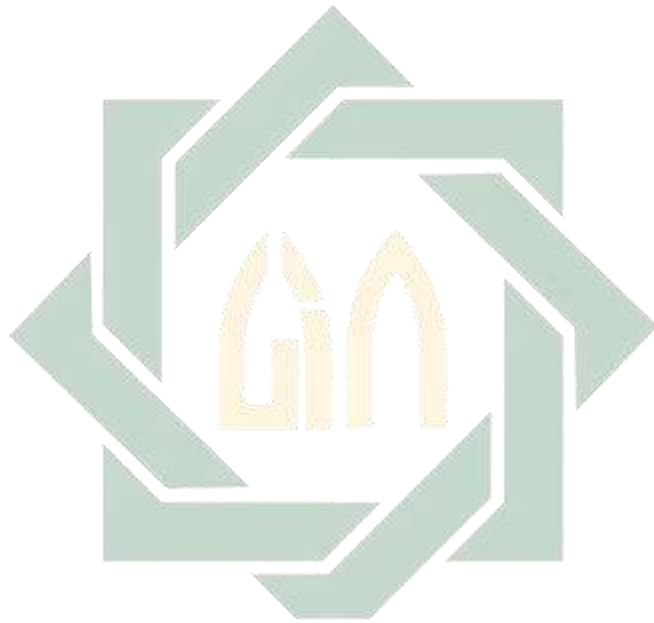
Gambar 1 Peta Administrasi Desa Sidokerto.....	47
Gambar 2 Struktur Pemerintahan Desa Sidokerto	48
Gambar 3 Struktur Badan Permusyawaratan Desa Sidokerto.....	53



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kasus Penyalahgunaan Aset Desa Sidokerto..... 2



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

i. Buku

- Abdul Khaliq, Farid. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- . *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi, Cetakan Keenam. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Banjarmasin: Ihtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Gazali. *Hukum tata negara Indonesia*. Cetakan pertama. Bantul, Yogyakarta: Genta Publishing, 2023.
- Gunardi. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Damera Press, 2022.
- Hamzani, Achmad Irwan, and Havis Aravik. *Politik Islam : Sejarah Dan Pemikiran*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2021.
- Hidjaz, M. Kamal. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Kammah, Hamzah. *Fiqh Siyasah : Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani*. Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Karso, A. Junaedi. *Buku Ajar Good Governance*. Cetakan 1. Yogyakarta: Samudra Biru, 2022.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Routledge, 2017.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Politik Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994.
- Kusnardi, Moh Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Jakarta Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1981.
- M Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Manan, Bagir. *Peranan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Armico, 1987.
- Mas Rabbani Lubis, Ali Akhbar Abaib. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

- Muchariman, Randi, and Helmi Al Djufri. *Siyasah Kebangsaan*. Purwokerto: Omera Pustaka, 2016.
- Nurdinawati, Eva. *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fikih siyasah*. Cetakan II. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019.
- Ridwan. *Fiqh Politik : Gagasan, Harapan, Kenyataan*. Jakarta: Amzah, 2020.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- . *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- . *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Stroik, F. A. M., and J. G. Steenbeek. *Inleiding In Het Staats En Administratief Recht*. Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1985.
- Sugeng, and Annisa Fitria. *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Cetakan pertama. Berbah, Sleman, Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2023.
- Suntana, Ija. *Politik Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Triwulan T., Titik, and Ismu Gunadi Widodo. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Wahyuni, Sri, and Rifki Khoirudin. *Pengantar Manajemen Aset*. Makassar: Nas Media Pustaka, 2020.
- Wasistiono. *Kapita Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokus Media, 2003.

ii. Jurnal

- Akbar, Ilham, Auradian Marta, and Zulkarnaini Zulkarnaini. “Kebijakan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Aset Desa.” *Jurnal Kebijakan Publik* 15, no. 1 (March 2024): 70. <https://doi.org/10.31258/jkp.v15i1.8371>.
- Al Ghifari, Abu Dzar. “Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa Pada Desa Tegal Gondo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.” Universitas lampung, 2015.

- Anam, S. K. "Evaluasi Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan." *Skripsi (Pekanbaru: Universitas Islam Riau)*, 2021, 91.
- Ansori, Muhammad Iqbal. "Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Dalam Mengelola Aset Kekayaan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa: Studi Kasus Di Desa Sukaasih Kecamatan Sukatani Kab. Bekasi." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.
- Arifin, Firdaus. "Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Perspektif Hukum Administrasi." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (September 2024): 670–84. <https://doi.org/10.24269/ls.v8i3.10213>.
- Ariyanti, Tasya Putri. "Tata Kelola BumDes Berdasarkan Perspektif Good Governance." *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 5, no. 03 (2025): 153–68.
- Bang, Henrik Paul. "Governing As Governance." *Public Administration* 85, no. 1 (March 2007): 227–31. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2007.00642_1.x.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Chasanuddin, Arif, and Zahrotun Nafisah. "Konsep Mashlahah Al-Ammah Dalam Perspektif Fiqh Sosial." *Islamic Review : Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 8, no. 2 (October 2019): 235–58. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v8i2.177>.
- Elviandri and Indra Perdana. "Pembentukan Peraturan Desa (PERDES): Tinjauan Hubungan Kewenangan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)." *Journal Equitable* 6, no. 1 (May 2021): 14–26. <https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1.2679>.
- Fadila, Annis, Meutia Putri Maulani, and Salsa Nazhifah. *Efektivitas Pengelolaan Aset Pengelolaan Rumah Sewa Desa Di Gampong Ceurih Banda Aceh*. 4, no. 2 (2023): 133–45. <https://doi.org/10.55314/tsg.v4i2.477>.
- Fadilah, Hilwa Nurrahmah, Beni Ahmad Saebani, and Yana Sutiana. "Tinjauan Siyasah Dusturiah terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 4 (2025): 3078–90.
- Fadjar Trisakti, Adnin Dikeu Dewi Berliana, Al Bukhori, and Alya Fitr. "Transparansi Dan Kepentingan Umum." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 1 (April 2022): 29–38. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.61>.
- Firmansyah, Windy Riyani, and Nyimas Lidya Putri. "Prinsip Syura dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 1 (June 2023): 36–49. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7209>.
- Galih Orlando. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." *Tarbiyah bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1 (December 2022). <https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77>.

- Hakim, Dani Amran, and Muhammad Havez. "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah." *Tanjungpura Law Journal* 4, no. 2 (August 2020): 95. <https://doi.org/10.26418/tlj.v4i2.41913>.
- Harpinsyah, Harpinsyah, and Maryanti Maryanti. "Pengelolaan Aset Pemerintah Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Kasus: Perencanaan, Pengadaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Dan Pembinaan. Aset Desa Ulak Makam Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin)." *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah* 5, no. 1 (June 2023): 1–11. <https://doi.org/10.36355/jppd.v5i1.107>.
- Hutasuhut, Ullynta Mona, Zuhraini Zuhraini, Agus Hermanto, and Triono Triono. "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah." *As-Siyasi* 2, no. 2 (December 2022): 135–52.
- Kamizi, Fajar, Sarkowi, Marzuki, and Dodi Irawan. "Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia." *Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2025): 17–24.
- Kusmidi, Henderi. "EKSISTENSI ISTIHSAN SEBAGAI DALIL ISTINBATH FIQH SIYASAH." *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 6, no. 2 (July 2021): 157. <https://doi.org/10.29300/imr.v6i2.2594>.
- Nugroho, Wedianto Adi, Made Warka, and Moh. Zeinudin. "Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa." *Tanjungpura Law Journal* 6, no. 1 (January 2022): 62–77. <https://doi.org/10.26418/tlj.v6i1.47297>.
- Prayoga, Dandy, and Budi Setiawati. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Pada Desa Sumur Kabupaten Barito Timur." *JAPB* 8, no. 2 (2025): 1055–63. <https://doi.org/10.35722/japb>.
- Qomaruzzaman, Q. Zaman. "Pemilu Legislatif Sistem Proporsional Tertutup Dan Terbuka Perspektif Siyasah Tasyri'iyah." *JATISWARA* 38, no. 2 (July 2023): 148–62. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.507>.
- Rato, Dominikus, Fendy Setyawan, and Koko Roby Yahya. "Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perseptif Filsafat Hukum." *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (February 2023): 45–60. <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v1i1.76>.
- Ringo, Adoni. "Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengelola Aset Desa (Studi Di Desa Panca Arga)." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2018.
- Ritonga, Roni Rahmad Hasonangan. "Kajian Implementasi Kepemimpinan Islam (Imamah, Khalifah, Dan Ulil Amri) Di Indonesia." *Journal for Islamic Studies* 8, no. 2 (2025): 2208–25.
- Said, Abdul Rauf Alauddin. "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (April 2016). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.613>.

- Setyaningrum, Christine Ayu, and Fifiana Wisnaeni. "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (May 2019): 158–70. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.158-170>.
- Suhartono, Suhartono, Nurarini Arsyad, and Finna Amelia. "Peran kepemimpinan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Studi pada pemerintah desa tonasa dan desa mamampang, tombolo pao)." *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia* 3, no. 3 (June 2020): 336–53. <https://doi.org/10.31842/jurnalnobis.v3i3.142>.
- Sumeru, Arief. "Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)* 4, no. 1 (March 2016): 47–56. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v4i1.198>.
- Susanto, Sri Nur Hari. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (June 2019): 126–42. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.126-142>.
- . "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan." *Administrative Law* 3, no. 3 (2020).
- Sutaryo, S. "Praktik Pengelolaan Aset Desa Di Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Tengah." *AKRUAL: Jurnal Akuntansi* 7, no. 2 (May 2016): 153. <https://doi.org/10.26740/jaj.v7n2.p140-162>.
- Syamsi, Syahrul. "Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3, no. 1 (2014).
- Wirawan, Fajar, Nanik Sutarni, and Muhammad Fauzan Hidayat. "Pengelolaan Tanah Kas Desa Oleh Kepala Desa Berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus di Desa Pusporenggo Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali)." *Jurnal Bedah Hukum* 6, no. 2 (October 2022): 140–52. <https://doi.org/10.36596/jbh.v6i2.684>.
- Yudho, Winarno, and Heri Tjandrasari. "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 1 (June 2017): 57. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>.
- Yuhdi, Mohammad. "Pergeseran Konsep Kedaulatan Rakyat Pasca Perubahan UUD NRI 1945." *Maksigama Jurnal Hukum*, 2016, 21–32.

iii. Peraturan Perundang-Undangan

"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

"Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>.

“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/5482/pp-no-43-tahun-2014>.

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/111552/permendagri-no-1-tahun-2016>.

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.”
<https://ppid.kemendagri.go.id/front/dokumen/detail/300325447>.

“Peraturan Daerah Jawa Timur No. 10 Tahun 2017 Tentang Barang Milik Daerah.”
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/85304/perda-prov-jawa-timur-no-10-tahun-2017>.

“Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa.” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/86264/perbup-kab-sidoarjo-no-48-tahun-2017>.

“Peraturan Desa Sidokerto Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Rincian Kekayaan Desa Sidokerto Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”

iv. Berita

Wachid Yulianto, “Dugaan korupsi jual beli tanah kas desa Rp 3,1 Miliar di Sidoarjo, Kades Sidokerto dan kroninya jadi tersangka,” pikiran rakyat surabaya, 11 Maret 2025, akses 30 Oktober 2025,

<https://surabaya.pikiran-rakyat.com/surabaya-raya/pr-3929143478/dugaan-korupsi-jual-beli-tanah-kas-desa-rp31-miliar-di-sidoarjo-kades-sidokerto-dan-kroninya-jadi-tersangka>

iv. Wawancara

1. Subagiyo. Kepala Desa Sidokerto Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. *Wawancara*. Sidoarjo, 05 Januari 2026.
2. Suhermanto. Sekretaris Desa Sidokerto Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. *Wawancara*. Sidoarjo, 23 Januari 2026
3. Setyo Tri Prabowo, Danang. Kepala Seksi Pelayanan Desa Sidokerto Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. *Wawancara*. Sidoarjo, 23 Januari 2026
4. Suyitno, Herry. Ketua BPD Desa Sidokerto Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. *Wawancara*. Sidoarjo 25 Januari 2026
5. M. Inwan. Anggota BPD Desa Sidokerto Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. *Wawancara*. Sidoarjo 25 Januari 2026
6. Ani. Masyarakat Desa Sidokerto Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. *Wawancara*. Sidoarjo 26 Januari 2026